



# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

---



---

Scan untuk Unduh





“Bagi kami di Kementerian Keuangan berarti kita bicara tentang perpajakan, pajak, bea cukai dan peraturan-peraturan lain yang mungkin mempengaruhi kinerja ekspor, kita akan terus menerus bekerja sama dengan instansi lain dalam mendukung ekspor dan menciptakan industri dalam negeri yang lebih kuat”

**Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati**

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF



Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp688,94 triliun atau 38,57 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 5,42 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp653,50 triliun.



Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 3,75 persen.

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp85,60 triliun atau 40,99 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 18,97 persen.



PNBP membukukan realisasi sebesar Rp209,08 triliun atau 55,27 persen dari target APBN tahun 2019.



Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp630,57 triliun atau 38,58 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 12,92 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.



TKDD mencapai Rp403,95 triliun atau 48,86 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 4,77 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

**P**rospek pertumbuhan perekonomian global tahun 2019 belum menunjukkan pemulihan seiring dengan belum meredanya tekanan perdagangan global dan adanya perlambatan perekonomian Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Namun, prospek pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan masih stabil yang didukung oleh konsumsi domestik. Disisi lain, keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) untuk mempertahankan suku bunga the Fed memberikan imbas mengalirnya modal ke emerging market, termasuk Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan penguatan nilai tukar mata uang negara emerging market. Sementara itu, tingkat inflasi juga berada pada level yang terkendali dan akan

dapat terus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah akan terus memfokuskan dalam memperbaiki kinerja transaksi berjalan guna lebih memperkuat pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan daya saing guna meningkatkan eskpor.

**Realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah hingga akhir Semester I atau akhir Juni tahun 2019 secara umum masih menunjukkan kinerja yang positif.** Penerimaan pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp898,76 triliun atau 41,51 persen terhadap target APBN 2019. Capaian tersebut tercatat masih mampu tumbuh sebesar 7,84 persen secara yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan periode Januari-Mei sebesar 6,19 persen (yoy). Penerimaan pendapatan negara meliputi realisasi

penerimaan perpajakan sebesar Rp688,94 triliun, PNBP sebesar Rp209,08 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp734,5 miliar atau masing-masing telah mencapai 38,57 persen, 55,27 persen, dan 168,73 persen dari target pada APBN 2019. Dari sisi pertumbuhannya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh sebesar 5,42 persen, PNBP mengalami perbaikan dengan tumbuh sebesar 18,24 persen, sedangkan penerimaan hibah tumbuh negatif 76,46 persen.

**Secara lebih rinci, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN 2019, serta mampu tumbuh sebesar 3,75 persen (yoy).**

Realisasi penerimaan pajak masih ditopang oleh penerimaan pajak utama Pajak Penghasilan (PPH) yaitu PPh Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana penerimaan PPh Nonmigas bersumber dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final, dan PPh 22 Impor. Kinerja impor pada bulan Juni 2019 yang masih tetap terjaga seperti periode yang sama tahun lalu, berkontribusi mendorong perbaikan kinerja PPh 22 Impor. **Pertumbuhan PPh Nonmigas utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 21, PPh 25/29 Orang Pribadi (OP), dan PPh 22 yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 14,93 persen (yoy), 13,82 persen (yoy), dan 11,09 persen (yoy).** Pertumbuhan realisasi komponen penerimaan PPh Nonmigas kinerjanya mengalami perbaikan dibandingkan periode Januari-Mei 2019 yang hanya tumbuh 2,43 persen (yoy). Lebih lanjut, pertumbuhan

positif penerimaan pajak juga didorong oleh pertumbuhan signifikan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari sisi sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak masih didorong oleh kinerja sektor usaha jasa keuangan dan transportasi & pergudangan. Pertumbuhan PPh 22 didorong oleh kinerja sektor usaha industri bahan bakar dan ketenagalistrikan yang mencerminkan peningkatan penggunaan energi serta tingginya konsumsi BBM selama arus mudik dan balik libur lebaran, serta liburan sekolah. Untuk pertumbuhan PPh 25/29 OP didorong oleh tren positif peningkatan kepatuhan Wajib Pajak OP, melanjutkan tren pasca masa pelaporan SPT Tahunan. Sementara itu, penerimaan dari PPN/PPnBM tumbuh negatif 2,66 persen (yoy), namun membaik jika dibandingkan pertumbuhan periode Januari-Mei 2019 yang mencapai negatif 4,41 persen (yoy). Perbaikan kinerja PPN/PPnBM ini akibat pertumbuhan restitusi yang lebih rendah daripada periode Januari-Mei 2019. Perbaikan PPN Dalam Negeri (PPN DN) juga karena adanya masa libur sekolah yang turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Hal ini terbukti dari tumbuhnya penerimaan pajak sektor usaha penyediaan akomodasi, makan-minum dan agen perjalanan.

**Penerimaan kepabeanan dan cukai realisasi penerimaannya telah mencapai 85,60 triliun atau 40,99 persen dari target APBN 2019, serta tumbuh cukup signifikan sebesar 18,97 persen (yoy).** Dari total penerimaan kepabeanan dan

cukai, 74,55 persen ditopang oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Sementara itu, dilihat dari sisi pertumbuhannya penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya mampu tumbuh sebesar 15,45 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan cukai terutama cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai MMEA yang tumbuh masing-masing sebesar 31,59 persen (yoy) dan 17,75 persen (yoy). Kondisi tersebut didorong oleh kelanjutan tren peningkatan pemesanan pita cukai di awal tahun 2019, serta adanya kenaikan tarif cukai MMEA dan keberhasilan program PCBT dalam mengurangi peredaran rokok dan MMEA ilegal. Realisasi penerimaan bea masuk mulai menunjukkan kondisi yang menggembirakan, hal ini terlihat baik dari capaian realisasi penerimaannya maupun pertumbuhannya. Penerimaan bea masuk telah terealisasi sebesar 17,27 triliun atau 44,40 persen dari target APBN 2019. Sementara itu, dari sisi pertumbuhannya, bea masuk mengalami perbaikan menjadi negatif 2,48 persen (yoy), lebih baik dibandingkan periode Januari-Mei yang mencapai negatif 3,34 persen (yoy). Pertumbuhan negatif bea masuk terjadi akibat penurunan devisa bayar impor seiring dengan tren penurunan nilai impor Indonesia pada Januari-Juni 2019. Sementara itu, penerimaan bea keluar realisasinya telah mencapai Rp1,63 triliun atau 36,87 persen dari target APBN 2019. Lebih lanjut, secara bulanan terlihat bahwa penerimaan bea keluar pada bulan Juni mengalami perbaikan dibandingkan dengan

penerimaan pada bulan Mei 2019. Kinerja penerimaan bea keluar sampai dengan akhir Juni 2019 masih mengalami pertumbuhan negatif akibat penurunan ekspor konsentrat tembaga.

**Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp209,08 triliun atau mencapai 55,27 persen dari target APBN 2019.**

Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 18,24 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi Penerimaan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp70,73 triliun atau 37,08 persen dibandingkan target dalam APBN 2019. Sementara itu, realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp16,16 triliun atau 52,16 persen terhadap APBN 2019. Untuk penerimaan negara yang bersumber dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan mencapai Rp68,68 triliun atau sebesar 150,65 persen. Peningkatan yang sangat signifikan ini terutama disebabkan adanya pendapatan dari surplus Bank Indonesia sebesar Rp30,09 triliun yang sebelumnya tidak ditargetkan dalam APBN 2019. Selanjutnya, penerimaan PNBP Lainnya, sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai Rp48,43 triliun atau sebesar 51,48 persen dari target APBN 2019. Pendapatan BLU hingga Juni 2019 telah mencapai Rp21,25 triliun atau 44,38 persen dari target APBN 2019. Meskipun kinerja PNBP Semester I-2019 cukup positif, Pemerintah akan terus mewaspadai pergerakan harga komoditas internasional dan nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar Amerika Serikat yang menjadi faktor utama perkembangan PNB.

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir semester I atau akhir Juni tahun 2019 sebesar Rp1.034,51 triliun (42,0 persen dari pagu APBN 2019), meningkat 9,59 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018.** Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui perbaikan pola penyerapan belanja. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp630,57 triliun (38,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp403,95 triliun (48,9 persen dari pagu APBN). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar 12,92 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai 70,49 triliun (69,1 persen dari pagu) atau meningkat sebesar 56,37 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih tingginya realisasi belanja tersebut dapat mencerminkan komitmen Pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhannya.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juni 2019 mencapai Rp71,87 triliun atau 32,04 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi belanja subsidi

tersebut meliputi subsidi energi Rp56,19 triliun dan subsidi nonenergi Rp15,68 triliun. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juni 2019 lebih rendah Rp2,07 triliun atau 2,80 persen dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018. Lebih rendahnya realisasi subsidi dimaksud terutama dikarenakan realisasi subsidi energi yang lebih rendah karena pada tahun 2018 terdapat pembayaran sebagian kekurangan subsidi energi tahun sebelumnya, serta harga indeks pasar (HIP) dan formula harga patokan LPG tahun 2019 yang lebih rendah dari tahun 2018. Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi justru lebih tinggi Rp1,25 triliun atau 8,67 persen daripada periode yang sama tahun 2018 karena terdapat percepatan realisasi Subsidi Pupuk dan Subsidi Kredit Program dalam tahun 2019. Selain itu, percepatan realisasi Public Service Obligation yang diberikan pada PT KAI (Persero) dan PT PELNI (Persero) turut mendorong kenaikan realisasi subsidi nonenergi.

**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Juni 2019 mencapai Rp403,95 triliun atau 48,86 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp362,11 triliun (47,85 persen) dan Dana Desa Rp41,83 triliun (59,76 persen).** Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp352,29 triliun (48,62 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp5,18 triliun (51,75 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp4,65 triliun (20,97 persen). Realisasi TKD sampai

dengan Juni 2019 tersebut lebih tinggi Rp12,40 triliun atau sekitar 3,55 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Juni 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) penyaluran DBH yang lebih tinggi 23,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain dipengaruhi oleh mulai disalurkannya DBH Pajak dan SDA Kehutanan serta penyaluran sebagian kurang bayar DBH terutama DBH Sumber Daya Alam Mineral, Batubara, dan Gas Bumi; (2) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah sebesar 21,77 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya meningkatnya penyaluran DID tahap I pada beberapa Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran tahap I secara tepat waktu; serta (3) realisasi Dana Keistimewaan DIY yang meningkat sebesar 20,00 persen yang diakibatkan karena tingginya penyaluran sampai dengan semester I tahun 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Juni 2019 lebih tinggi Rp5,97 triliun (16,65 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun

2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya penyaluran sampai dengan Semester I tahun 2019 karena telah terpenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PMK No.193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

**Keberlanjutan fiskal di tahun 2019 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga akhir Semester I atau akhir Juni tahun 2019 mencapai Rp135,75 triliun atau sekitar 0,84 persen PDB.**

Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada akhir Juni 2019 berada pada posisi negatif Rp0,98 triliun. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp175,35 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp180,45 triliun yang meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp195,72 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp15,27 triliun. Pemerintah secara konsisten melakukan pengelolaan utang secara prudent dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.

## Realisasi APBN sampai dengan Juni 2019

**R**ealisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2019 (Semester I) masih menunjukkan capaian positif dengan pendapatan negara yang mampu tumbuh 7,84 persen dan belanja negara meningkat 9,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta defisit anggaran terkendali pada level 0,84 persen terhadap PDB.

Secara ringkas APBN 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 mencatat bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp898,76 triliun atau 41,51 persen dari target APBN tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp833,45 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.034,51 triliun atau 42,03 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 9,59 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018. Adapun rincian dari realisasi tersebut meliputi:

a. Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp688,94 triliun atau 38,57 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 5,42

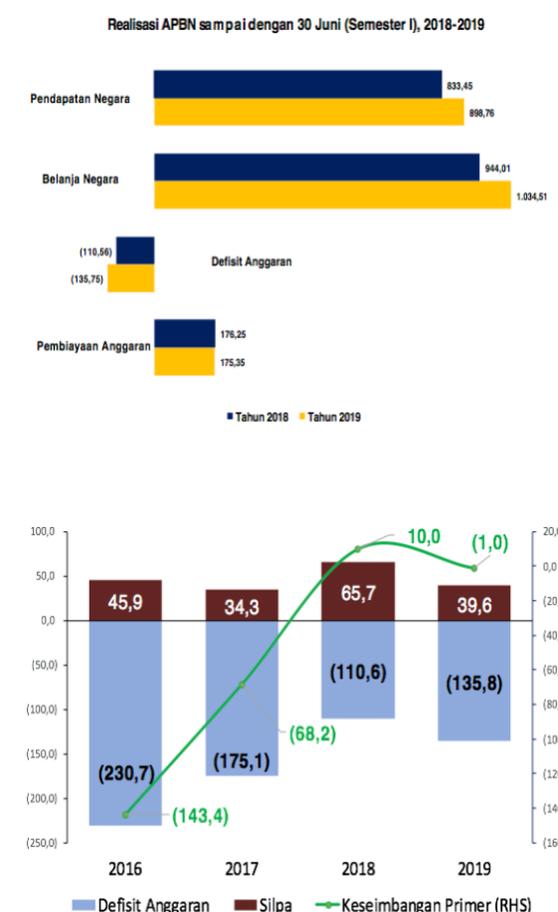
persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp653,50 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:

- Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 3,75 persen.
- Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp85,60 triliun atau 40,99 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 18,97 persen.

- b. PNBPN membukukan realisasi sebesar Rp209,08 triliun atau 55,27 persen dari target APBN tahun 2019.
- c. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp630,57 triliun atau 38,58 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 12,92 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

- d. TKDD mencapai Rp403,95 triliun atau 48,86 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 4,77 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

Dengan capaian pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp135,75 triliun atau 0,84 persen terhadap PDB, dengan nilai keseimbangan primer negatif Rp0,98 triliun. Realisasi Defisit APBN tahun 2019 tersebut lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2018 yakni Rp110,56 triliun atau 0,75 persen PDB, dengan nilai keseimbangan primer Rp10,04 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp175,35 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp6,50 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp39,60 Triliun.



# PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Prospek positif ekonomi nasional dan pelonggaran likuiditas global memperkuat stabilitas ekonomi nasional

**Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2019 diperkirakan menunjukkan kondisi yang optimis, melanjutkan momentum pertumbuhan yang dicapai pada Triwulan I 2019. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2019 diperkirakan didorong oleh pertumbuhan konsumsi domestik.**

Konsumsi tumbuh relatif tinggi seiring efek pelaksanaan pemilu dan Hari Raya Idul Fitri. Optimisme atas pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh perkembangan Indeks kepercayaan konsumen (IKK) dimana selama semester I 2019 berada pada level optimis, yakni di atas 100 dan di Juni 2019 pada level 126,4. Sementara itu, Survei Penjualan Eceran yang mengindikasikan perkembangan pada bulan April mampu tumbuh 6,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan investasi akan didorong oleh kelanjutan pembangunan infrastruktur dan perbaikan sentimen investasi pasca pelaksanaan pemilu. Purchasing

Managers' Index untuk Manufaktur Indonesia pada Juni 2019 tercatat sebesar 50,6 yang masih menunjukkan prospek aktivitas bisnis yang meningkat. Pertumbuhan konsumsi pemerintah melalui pertumbuhan belanja negara juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Triwulan II 2019.

**Pada bulan Juni 2019, inflasi tercatat sebesar 0,55 persen (mtm) atau 2,05 persen (ytd) atau 3,28 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai merah.** Laju inflasi Juni 2019 secara bulanan lebih rendah dibanding Juni 2018 (inflasi 0,59 persen (mtm) atau 1,90 persen (ytd) atau 3,12persen (yoy)) yang dipengaruhi oleh kembali normalnya permintaan masyarakat setelah masa HBKN Ramadan dan Lebaran meskipun masih terdapat tekanan pada saat menjelang Lebaran (minggu I Juni). Kelompok bahan makanan

memberikan andil inflasi terbesar terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga aneka cabai, beberapa jenis buah dan sayuran, serta ikan segar akibat faktor cuaca. Tekanan inflasi kelompok bahan makanan sedikit tertahan karena deflasi komoditas bawang putih, daging ayam, dan telur ayam ras. Sementara itu, setelah lima bulan terakhir berturut-turut menyumbang inflasi, tarif angkutan udara mengalami penurunan harga yang mendorong kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi. Penurunan tarif angkutan udara terjadi di 32 kota setelah berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan No 106 Tahun 2019 tentang penurunan tarif batas atas dengan rata-rata sebesar 15 persen.

**Nilai tukar Rupiah terus berada pada posisi yang stabil dan cenderung menguat seiring perbaikan prospek ekonomi**

**nasional dan pelonggaran likuiditas global.** Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 8 Juli 2019 tercatat pada level Rp14.155 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Rupiah mengalami apresiasi sebesar 2,2 persen (ytd) dibandingkan awal tahun 2019. Dari sisi eksternal, pelonggaran likuiditas global karena the Fed masih mempertahankan suku bunga yang mengakibatkan aliran modal ke emerging market, termasuk Indonesia dan memberikan pengaruh terhadap penguatan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, prospek positif ekonomi nasional yang tetap terjaga, termasuk peningkatan sovereign credit rating Indonesia, juga memberikan pengaruh terhadap penguatan nilai tukar. Hingga akhir Juni 2019, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang cukup tinggi, yakni sebesar USD123,8 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir Mei 2019 sebesar USD120,3 miliar. Posisi cadangan devisa ini setara

dengan pembiayaan 7,1 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

**Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2019 mencatatkan surplus sebesar USD0,21 miliar, dimana pada bulan sebelumnya mengalami defisit sebesar USD2,28 miliar.**

Kinerja neraca perdagangan yang mengalami surplus pada bulan Mei 2019 dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan non migas yang tercatat sebesar USD1,2 miliar. Selain itu, penurunan defisit neraca perdagangan migas juga mempengaruhi kinerja surplus neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan migas mengalami penurunan dari USD1,5 miliar pada bulan April 2019 menjadi defisit sebesar USD0,98 miliar. Nilai ekspor pada Mei 2019 mencapai USD14,74 miliar meningkat sebesar 12,42 persen (mtm) dan 8,99 persen (yoy). Namun secara kumulatif, nilai ekspor Januari-Mei 2019 mencapai USD68,46 miliar atau menurun 8,61 persen (yoy). Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Mei 2019 mencapai USD14,53 miliar atau turun 5,62 persen (mtm) dan 17,71 persen (yoy). Nilai impor kumulatif Januari-Mei 2019 adalah USD70.601,9 juta atau turun 9,23 persen (yoy). Surplus neraca perdagangan pada Mei 2019 ini diharapkan akan berdampak positif

terhadap prospek neraca transaksi berjalan 2019. Koordinasi Pemerintah dan stakeholders lainnya dalam mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik sangat diperlukan guna menjaga stabilitas eksternal dan memperbaiki prospek neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

**Pembangunan sektor pariwisata yang dilaksanakan selama ini mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.** Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan dan penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang juga terus mengalami peningkatan. Pada Mei 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebesar 1,26 juta, naik 1,1 persen (yoy) atau turun 3,19 persen (mtm). Secara kumulatif, dari Januari-Mei 2019 jumlah kunjungan wisman mencapai 6,37 juta kunjungan atau naik 2,7 persen (yoy). Pemerintah menargetkan kedatangan wisman pada tahun 2019 sebesar 20 juta kunjungan atau naik 26,53 persen dari jumlah kunjungan tahun 2018 yang mencapai sebesar 15,8 juta, dengan target pemasukan devisa USD17,6 miliar. Dengan peningkatan fokus pembangunan sektor pariwisata dan peningkatan konektivitas antar wilayah diharapkan akan meningkatkan perkembangan sektor pariwisata.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*



## Laporan Semester I APBN 2019

---

**P**erkembangan perekonomian Indonesia pada paruh pertama tahun 2019 masih tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Hal ini menunjukkan sinyal positif di tengah kondisi perekonomian global yang diproyeksikan masih melambat di tahun 2019. Perlambatan perekonomian tersebut diantaranya dipicu oleh risiko-risiko eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memberi tekanan pada sektor keuangan negara-negara berkembang yang mempengaruhi arus investasi dan nilai tukar. Namun, kebijakan Pemerintah yang konsisten dalam mendorong investasi dan peningkatan produktivitas memberi dampak positif pada stabilitas ekonomi. Sejalan dengan itu, stabilitas ekonomi dari sisi inflasi juga masih tetap terkendali pada tingkat yang relatif rendah. Dengan tingkat inflasi tersebut diyakini dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Kinerja APBN pada paruh pertama tahun 2019 memberi dampak

signifikan dalam kestabilan perekonomian Indonesia sebagai wujud peran countercyclical dalam merespon kondisi perekonomian. Dari sisi pendapatan negara dan hibah, kinerja realisasi menunjukkan tren positif. Selain dari tumbuhnya penerimaan sektor perpajakan, bea cukai, dan PNBP, kebijakan pendapatan negara juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi melalui insentif pajak. Dari sisi belanja negara, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui perbaikan pola penyerapan belanja yang mendorong investasi dan sektor-sektor produktif. Selain itu, Pemerintah juga berupaya mendorong daya beli dan produktivitas masyarakat melalui program-program seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta percepatan penyaluran subsidi pupuk dan subsidi kredit program. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pertumbuhan penyerapan transfer ke daerah

Foto:  
Anas Nur Huda

dan dana desa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Keberlanjutan fiskal pada paruh pertama tahun 2019 tetap dijaga. Hal ini terlihat dari defisit anggaran yang terkendali dan rasio utang dalam batas aman. Realisasi pendapatan negara mampu tumbuh sebesar 7,8 persen yang terutama dipengaruhi oleh masih positifnya kinerja ekonomi domestik. Sementara sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mampu tumbuh sebesar 18,2 persen meskipun dibayangi penurunan harga komoditas di pasar global.

Sementara itu, realisasi belanja negara meningkat 9,6 persen pada paruh Semester I tahun 2019. Akselerasi penyerapan anggaran pada belanja pemerintah pusat mampu mendorong sektor konsumsi melalui kombinasi penyerapan belanja pegawai, barang dan bantuan sosial. Sedangkan penyerapan belanja modal menjadi daya pengungkit pada sektor investasi. Selain itu, Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan di daerah terutama percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana insentif daerah (DID) dengan tetap memerhatikan

penguatan program kegiatan berbasis tenaga kerja, serta pencairan anggaran berbasis output.

Dengan membandingkan pencapaian pendapatan negara dan belanja negara, realisasi defisit anggaran mencapai Rp135,8 triliun atau 0,84 persen dari PDB dan keseimbangan primer mencapai negatif Rp1,0 triliun. Di sisi pembiayaan anggaran, konsistensi pemerintah dalam penyehatan fiskal dapat terlihat pada penurunan pembiayaan anggaran sebesar 0,5 persen. Selain itu, kecenderungan penurunan nilai yield surat berharga negara juga berdampak pada rendahnya nilai pembayaran bunga utang. Kondisi tersebut menunjukkan semakin prudent-nya pengelolaan fiskal yang selalu dijaga pemerintah secara konsisten dan terukur.

Berdasarkan realisasi pada paruh pertama tahun 2019 dan prospek ekonomi ke depan, Pemerintah tetap optimis mampu menjaga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2019.

Dari sisi perpajakan, Pemerintah mendorong penggunaan layanan

perpajakan secara online dan implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information (AEOI). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah aparatatur pajak dalam melakukan pemungutan dan penagihan yang lebih adil dan merata, sehingga dalam jangka panjang tax ratio Indonesia dapat semakin meningkat

Pada tahun 2019, yang merupakan tahun terakhir RPJMN 2015-2019, belanja pemerintah pusat akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja pemerintah pusat yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi. Adapun belanja K/L, sebagai bagian dari belanja pemerintah pusat, akan difokuskan untuk penyelesaian program/kegiatan yang telah direncanakan pada APBN 2019.

Sementara itu, proyeksi realisasi TKDD akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar masyarakat serta pembangunan sarana dan

prasarana publik di daerah agar dapat menurunkan kesenjangan antardaerah. Di samping itu, percepatan pemanfaatan Dana Desa melalui skema padat karya tunai (*cash for work*) yang telah diterapkan pada semester I tahun 2019 diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di daerah.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, upaya efisiensi atas kombinasi sumber-sumber pendanaan serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif (*creative financing*) masih akan terus dilakukan oleh Pemerintah. Dengan adanya kombinasi antara peran serta Pemerintah dan pembiayaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Layanan Usaha (BLU) diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra mikro dan UMKM.



## Objek PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan: Bentuk Penguatan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.

**PNBP  
KND**

DIVIDEN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN

SURPLUS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SURPLUS OTORITAS JASA KEUANGAN

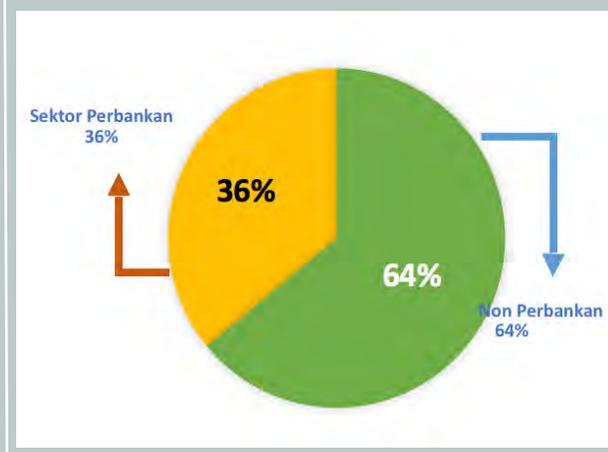
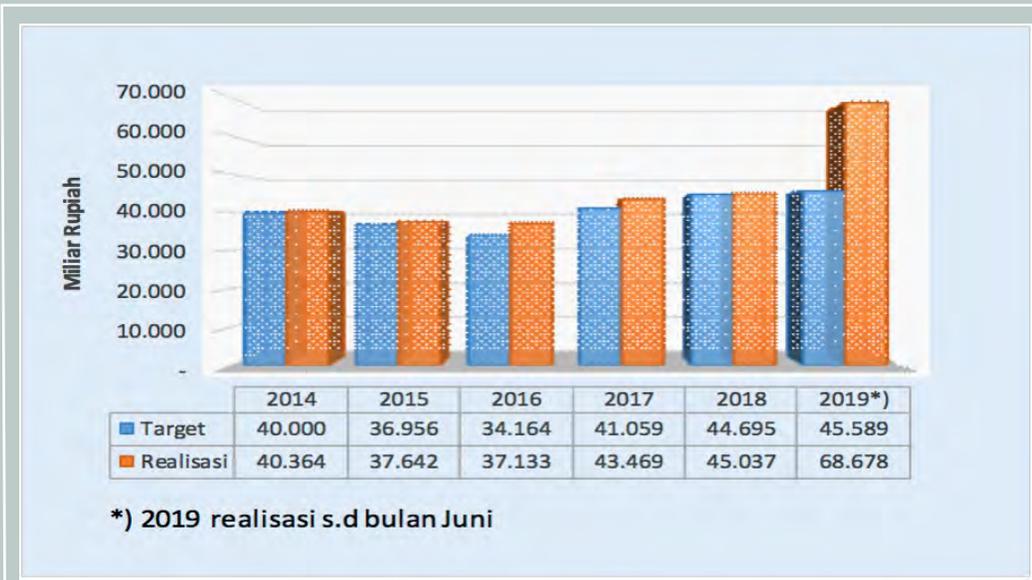
SURPLUS BANK INDONESIA

BAGIAN LABA PEMERINTAH DAN AKUMULASI CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN PADA LPEI

**S**alah satu dari enam objek PNBP sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adalah PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). PNBP yang termasuk dalam objek ini berasal dari dividen bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), surplus lembaga dari Bank Indonesia,

Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta akumulasi cadangan dan bagian laba pemerintah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sesuai yang telah diatur dalam regulasi masing-masing lembaga.

Dari tahun ke tahun, jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan KND terutama dari setoran dividen bagian pemerintah atas laba BUMN



Target dan Realisasi PNBPN yang berasal dari Dividen Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Periode tahun 2014-2018

memberikan kontribusi secara signifikan dan berkelanjutan terhadap penerimaan negara. Beberapa BUMN berperan aktif dalam memberikan dividen bagian pemerintah terbesar seperti PT. Telkom (Persero) Tbk., PT. PERTAMINA (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata penerimaan negara

dari dividen bagian pemerintah adalah Rp40,7 triliun, dengan capaian realisasi kontribusi PNBPN setiap tahun cenderung mengalami peningkatan dengan persentase yang cukup signifikan.

Di tahun 2018, realisasi PNBPN yang berasal dari dividen bagian pemerintah mencapai Rp45,04 triliun. Realisasi yang besar ini menyumbang sekitar 11% dari total penerimaan PNBPN di tahun 2018. Pada tahun tersebut, sebanyak 81 (delapan puluh satu) BUMN tercatat memberikan bagian dividen kepada pemerintah, dengan kontributor utama berasal dari:

- a. BUMN Sektor Non Perbankan sebesar Rp28,8 triliun. BUMN Sektor Non Perbankan ini berasal dari BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan energi, serta jasa keuangan non perbankan, seperti PT. Telkom (Persero) Tbk., PT. PERTAMINA

(Persero), PT. Inalum (Persero).

- b. BUMN Sektor Perbankan sebesar Rp16,3 triliun. BUMN Sektor Perbankan ini yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. BNI (Persero) Tbk., PT. BRI (Persero) Tbk., dan PT. BTN (Persero) Tbk.

Salah satu hal yang mempengaruhi besaran dividen yang disetorkan kepada Pemerintah adalah pengaturan terkait tarif. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, besaran tarif PNBPN yang berasal dari pengelolaan KND diatur dalam Undang-Undang untuk yang berasal dari lembaga seperti BI, OJK, dan LPS serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk yang berasal dari dividen laba BUMN.

Dalam Undang-Undang lembaga atau badan negara, contohnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, terdapat aturan yang menjadi dasar pengenaan PNBPN yang berasal dari lembaga atau badan negara, berbentuk surplus. PNBPN dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah perhitungannya berasal dari Surplus Bank Indonesia dikurangi 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan, sisanya dipupuk

sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, sehingga sisa surplus dimaksud disetor/dipindahbukukan sebagai PNBPN. PNBPN yang berasal dari surplus lembaga juga terdapat pada regulasi yang mengatur lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

PNBPN yang berasal dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Bagian Pemerintah adalah bagian Surplus dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total simpanan pada seluruh bank, sehingga selebihnya merupakan PNBPN yang harus disetor ke Kas Negara.

Pengaturan terkait tarif ini perlu didasari pertimbangan berupa keseimbangan antara kebutuhan pemenuhan target penerimaan negara dan kebutuhan BUMN untuk terus berkembang. Perkembangan BUMN akan berdampak pada perkembangan perekonomian nasional dan

terselenggaranya kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu dalam mengatur besaran tarif PNBPN yang berasal dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan ini harus mempertimbangkan beberapa hal meliputi kebutuhan investasi badan, kondisi keuangan badan, operasional badan, dan kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBPN juga memberi kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal untuk menetapkan target PNBPN dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk didalamnya penetapan target PNBPN yang berasal dari pengelolaan KND. Penetapan target PNBPN dari pengelolaan KND yang rasional menjadi tantangan tersendiri, terlebih saat ini terdapat beberapa BUMN dalam proses holding yang dampaknya terhadap PNBPN dari Pengelolaan KND perlu dianalisis lebih mendalam. Selain itu, fluktuasi harga

komoditas khususnya minyak, gas dan batubara serta adanya penugasan pemerintah juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menetapkan target PNBPN.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN setidaknya memberikan tiga elemen dasar yang menguatkan pengaturan PNBPN yang berasal dari pengelolaan KND karena pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBPN tidak cukup lengkap diatur dalam, penguatan tersebut berupa adanya klasifikasi objek baru yaitu PNBPN dari Pengelolaan KND, adanya pengaturan penentuan tarif termasuk didalamnya tarif PNBPN dari Pengelolaan KND, serta kewenangan penetapan target PNBPN Pengelolaan KND oleh Menteri Keuangan. Dengan adanya pengaturan dari sisi regulasi ini diharapkan ada perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola yang mampu mengoptimalkan PNBPN yang berasal dari pengelolaan KND ke depannya.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*



Foto:  
Anas nur Huda

# PENDAPATAN PAJAK

Semester I 2019 : Penerimaan Pajak Terkumpul  
Rp603,34 Triliun

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi  
Penerimaan  
Pajak s.d.  
Juni 2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - Juni 2019		
		Nominal	Δ% 2018 - 2019	% thd Target
Pajak Penghasilan	894,45	376,32	4,71 %	42,07 %
- Migas	66,15	30,16	0,31 %	45,59 %
- Non Migas	828,29	346,16	5,11 %	41,79 %
PPN & PPhBM	655,39	212,32	-2,66 %	32,40 %
PBB & Pajak Lainnya	27,71	14,70	265,81%	53,05 %
<b>Jumlah</b>	<b>1.577,56</b>	<b>603,34</b>	<b>3,75 %</b>	<b>38,25 %</b>

\*angka sementara per Juni 2019

Sampai akhir Semester I 2019, penerimaan pajak telah mencapai Rp603,34 triliun, atau 38,25 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. Dibandingkan dengan Semester I 2018, penerimaan pajak mengalami

pertumbuhan 3,75 persen (yoy). Angka pertumbuhan ini naik dibandingkan bulan lalu (periode Januari - Mei) yang sebesar 2,43 persen (yoy). Kenaikan ini dikarenakan secara bulanan penerimaan Juni 2019 tumbuh *double digits* 10,35 persen (yoy) terhadap Juni

Jenis Pajak	Realisasi		Δ%
	Jan-Juni 2019	Jan-Juni 2018-2019	
PPh Pasal 21	78,08	14,93 %	
PPh Pasal 22	8,41	11,09 %	
PPh Pasal 25/29	131,91	3,97 %	
- Badan	123,97	3,40 %	
- Orang Pribadi	7,94	13,82 %	
PPh Final	56,21	3,63 %	
PPN Dalam Negeri	123,50	-2,90 %	
Pajak atas Impor	111,78	-1,05 %	
- PPh 22 Impor	27,64	2,29 %	
- PPN Impor	82,10	-2,10 %	
- PPnBM Impor	2,04	-1,90 %	

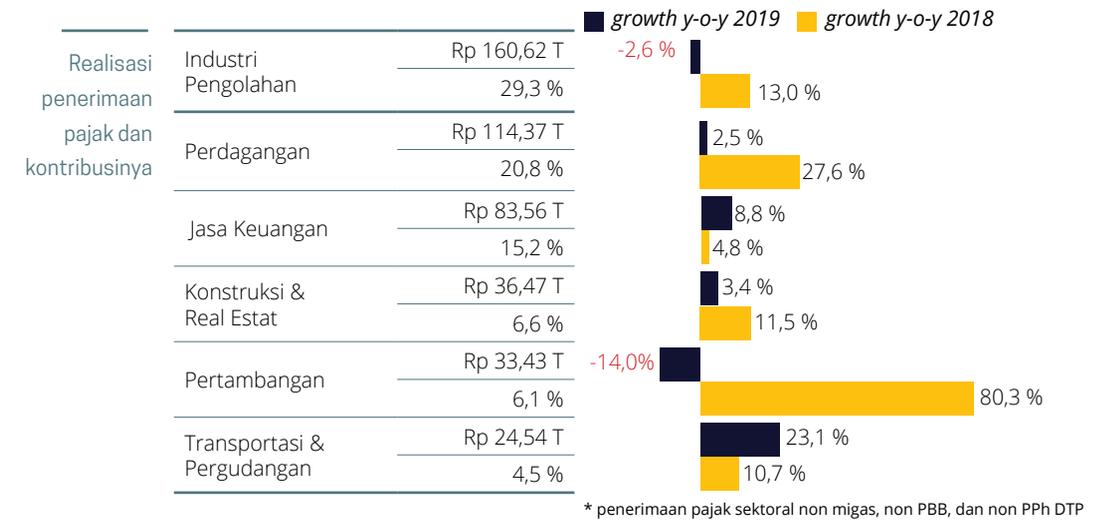
tahun lalu, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan lalu (Mei 2019) yang tumbuh 7,73 persen (yoy) terhadap Mei tahun lalu.

PPh Pasal 21 masih menjadi sumber utama pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir Semester I tahun ini. Tumbuh double digits 14,93 persen (yoy), kombinasi pembayaran bonus/THR Idul Fitri 1440H terhadap pegawai/karyawan dan baiknya kondisi pasar tenaga kerja menjadi faktor utama. Hal ini sejalan dengan data BPS bulan Mei 2019, yang menunjukkan Upah Nominal Harian Pekerja / Buruh mengalami peningkatan baik tahunan (yoy) maupun bulanan (mom), mengisyaratkan tingkat utilisasi tenaga kerja sepanjang 2019 dalam kondisi sehat.

PPh Pasal 22 tumbuh double digits 11,09 persen (yoy), terutama

bersumber dari potongan/pungutan atas penjualan energi listrik dan bahan bakar, yang didorong peningkatan konsumsi energi menjelang dan sepanjang bulan Mei, bertepatan dengan periode Ramadhan – Idul Fitri 1440H. Sementara itu PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan baseline setoran sebagai hasil dari program pengampunan pajak (tax amnesty), sehingga meskipun telah memasuki tahap normalisasi masih mampu mencatatkan pertumbuhan double digits 13,82 persen (yoy), baik dari setoran masa (bulanan) yang tumbuh 13,27 persen (yoy) maupun setoran tahunan yang tumbuh 15,29 persen (yoy).

PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 3,40 persen (yoy). Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan tahun lalu, diakibatkan oleh (i) pertumbuhan



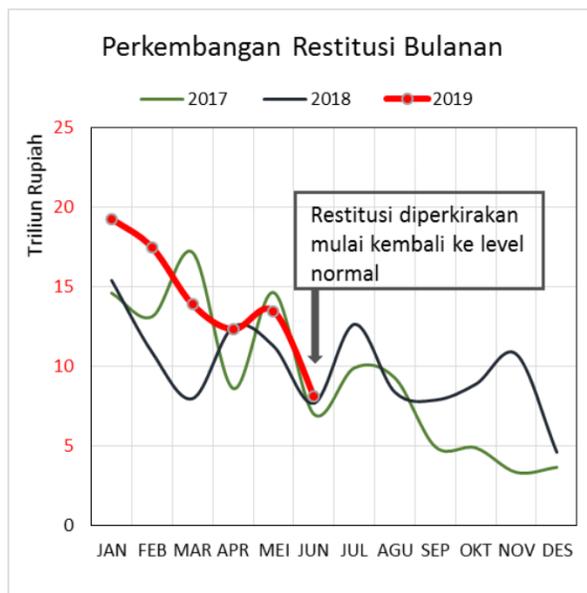
restitusi yang cukup tinggi yang mencapai 17,20 persen (yoy); dan (ii) melambatnya pertumbuhan laba korporasi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu, yang mengakibatkan penerimaan bruto hanya tumbuh 5,56 persen (yoy), tidak setinggi tahun lalu yang mampu mencapai 10,73 persen (yoy). Demikian juga PPh Final yang tumbuh 3,63 persen (yoy), apabila restitusi dikecualikan dari perhitungan penerimaan, secara bruto masih mampu tumbuh 6,27 persen (yoy).

Di sisi lain, PPN Dalam Negeri merupakan jenis pajak yang paling terpengaruh oleh peningkatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) dengan pertumbuhan negatif 2,90 persen (yoy). Bila dikecualikan dari perhitungan, pertumbuhan bruto PPN Dalam Negeri sebenarnya mencapai 5,69 persen (yoy). Senada dengan hal tersebut, pajak-pajak

atas impor mengalami pertumbuhan negatif seiring turunnya impor nasional. Nilai impor Indonesia bulan Mei 2019 turun 5,62 persen (mom) dibanding April 2019, dan 17,71 persen (yoy) dibanding bulan Mei 2018. Hal ini mengakibatkan penurunan PPN Impor dan PPnBM Impor masing-masing 2,10 persen (yoy) dan 1,90 persen (yoy). PPh Pasal 22 Impor masih tumbuh positif 2,29 persen (yoy), didukung perubahan tarif yang berlaku sejak triwulan III 2018.

Khusus untuk PBB, pertumbuhan yang mencapai 265,81 persen (yoy) disebabkan pergeseran waktu (time-shifting) pembayaran lebih awal PBB Migas, dari bulan Oktober dan November di tahun 2018, menjadi bulan Juni di tahun 2019 ini.

Dari perspektif sektoral, sektor Transportasi & Pergudangan



Perkembangan Restitusi Bulanan mengalami pertumbuhan paling signifikan sepanjang Semester I tahun 2019 ini, tumbuh double digits 23,1 persen (yoy). Demikian pula dengan Industri Jasa Keuangan yang tumbuh 8,8 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan pajak kedua sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB sektoralnya (Triwulan I 2019 sebesar 5,25 persen dan 7,33 persen (yoy)). Di sisi lain, tekanan restitusi sangat dirasakan oleh sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan. Sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan juga terpengaruh efek penurunan impor dan terbatasnya ekspansi sektoral. Apabila dikecualikan dari perhitungan, pertumbuhan bruto non-impor kedua sektor ini

sebenarnya positif, masing-masing sebesar 7,4 persen (yoy) dan 9,1 persen (yoy). Sementara itu, sektor Pertambangan juga merasakan tekanan akibat penurunan harga-harga komoditas di pasar global. Apabila restitusi dikecualikan dari perhitungan, penerimaan bruto sektor Pertambangan hanya mengalami penurunan 4,65 persen (yoy).

Secara umum kinerja penerimaan pajak menunjukkan peluang untuk meningkat di Semester II 2019. Setelah sempat mengalami lonjakan restitusi pada bulan Februari dan Maret yang menekan pertumbuhan netto, secara umum di akhir Semester I ini pertumbuhan penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda-tanda recovery, seiring kembali normalnya pertumbuhan restitusi. Perkembangan positif perang dagang AS – Cina dan resolusi hasil Pemilu 2019 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Dengan didukung membaiknya perekonomian domestik, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, perluasan basis pembayar pajak, serta terus berjalannya program reformasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan dan reformasi administrasi termasuk penguatan teknologi informasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak cukup optimis akan semakin meningkatnya kinerja penerimaan pajak pada Semester II 2019.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*

# KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Semester I Tahun 2019 Tertinggi Dalam 3 Tahun Terakhir

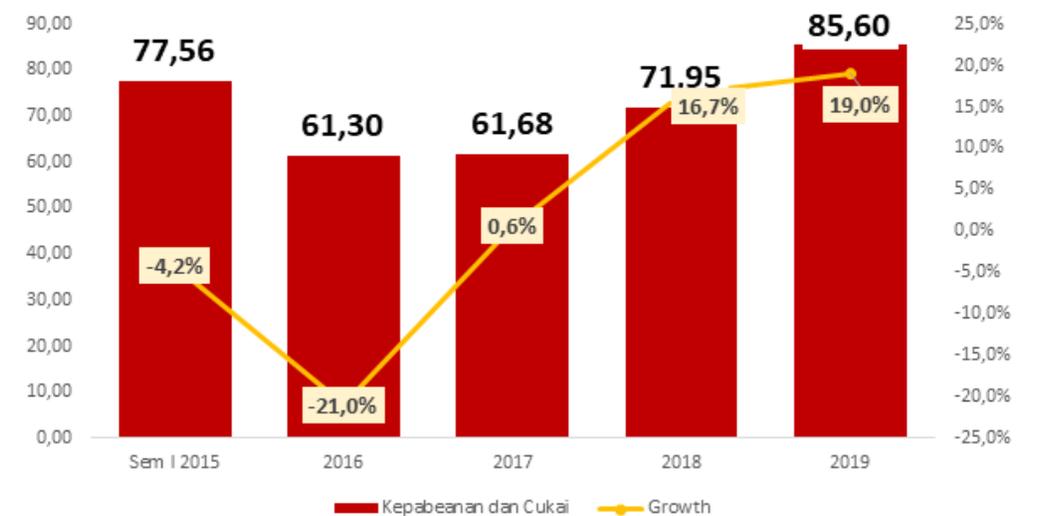
Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai s.d. 30 Juni 2019

No.	Jenis Penerimaan	APBN 2019	Realisasi s.d. Juni 2019		Pertumbuhan (yoy)		% Capaian
			2018	2019	%2018	%2019	
1	BEA MASUK	38.90	17.71	17.27	12.98	-2.48	44.40
2	CUKAI	165.50	50.96	66.70	15.02	30.89	40.30
	Hasil Tembakau	158.86	48.50	63.82	14.84	31.59	40.18
	Ethil Alkohol	0.16	0.07	0.06	-7.83	-10.24	36.98
	MMEA	5.99	2.36	2.78	13.50	17.75	46.50
	Denda Adm. Cukai	-	0.02	0.03	-123.06	26.33	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	49.94	50.04	-
	Plastik	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BEA KELUAR	4.42	3.28	1.63	93.75	-50.32	36.87
	TOTAL	208.82	71.95	85.60	16.66	18.97	40.99

**P**enerimaan kepabeanaan dan cukai hingga semester I tahun 2019 telah mencapai Rp 85,60 triliun. Capaian tersebut merupakan 40,99 persen dari target yang diamanatkan sebesar Rp 208,82 triliun. Realisasi penerimaan semester I tahun 2019 itu tumbuh 18,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018, bahkan merupakan kinerja pertumbuhan yang tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan

penerimaan cukai terutama cukai hasil tembakau yang konsisten tumbuh signifikan sejak awal tahun.

Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) hingga semester I tahun 2019 telah mencapai Rp 111,78 triliun. Capaian PDRI tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,05 persen. Namun demikian, total penerimaan kepabeanaan dan cukai dan PDRI hingga bulan Juni 2019 sebesar Rp 197,38 triliun atau tumbuh 6,74 persen (yoy).



Penerimaan Bea Masuk (BM) sepanjang semester I tahun 2019 adalah sebesar Rp 17,27 triliun, atau 44,40 persen dari target BM pada APBN tahun 2019. Persentase realisasi penerimaan BM terhadap targetnya, merupakan yang tertinggi dibandingkan komponen penerimaan yang lain. Penerimaan BM mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,48 persen. Hal itu disebabkan perlambatan aktivitas impor yang terjadi sejak awal tahun 2019.

Penerimaan cukai sampai dengan semester I tahun 2019 adalah sebesar Rp 66,70 triliun atau 40,30 persen dari target penerimaan cukai pada APBN tahun 2019. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 30,89 persen dibandingkan capaian tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan cukai dikontribusi oleh cukai hasil tembakau (CHT), dan kemudian minuman mengandung etil alkohol (MMEA) serta etil alkohol (EA).

Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Penerimaan CHT, sebagai kontributor terbesar penerimaan cukai, hingga bulan Juni 2019 mencapai sebesar Rp 63,82 triliun atau 40,18 persen dari targetnya. Capaian penerimaan CHT tumbuh tinggi sebesar 31,59 persen dibanding pertumbuhan Juni 2018 yang hanya 14,84 persen. Pertumbuhan positif tersebut sebagai efek dari kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai (CK1), ditambah semakin gencarnya program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dalam mengurangi peredaran rokok ilegal.

Penerimaan MMEA sepanjang semester I tahun 2019 mencapai sebesar Rp 2,78 triliun, capaian ini tumbuh positif sebesar 17,75 persen dibanding capaian periode yang sama tahun lalu. Program PCBT turut berkontribusi dalam mengurangi

peredaran MMEA ilegal, alhasil MMEA legal produksi dalam negeri memenuhi pasar yang sebelumnya dipenuhi produk MMEA ilegal. Penerimaan EA hingga bulan Juni 2019 sendiri telah mencapai Rp 0,06 triliun atau 36,98 persen dari targetnya.

Penerimaan BK sampai dengan bulan Juni 2019 mencapai sebesar Rp 1,63 triliun atau 36,87 persen dari target yang diamanatkan APBN tahun 2019. BK dari komoditas ekspor mineral (tambang) masih mendominasi, terutama konsentrat tembaga. Namun demikian, terjadi pertumbuhan positif penerimaan BK dari komoditas bauksit dan nikel, serta komoditas selain mineral seperti produk kelapa sawit dan biji kakao.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*

## Bea Cukai Buka “Toko Serba Ada” Di Perbatasan

Sebagai upaya mengurangi penyelundupan dan penyalahgunaan fasilitas di perbatasan, Bea Cukai memfasilitasi “toko serba ada” yang menyediakan kebutuhan pokok dengan memfasilitasi pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) Bahan Pokok di Perbatasan. PLB tersebut memberikan kemudahan bagi para pelintas batas dalam memenuhi kebutuhan pokok. Cukup dengan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau di PLB Bahan Pokok, para pelintas batas mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Selain PLB Bahan Pokok yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.04/2019, Bea Cukai juga melakukan modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk pelintas batas. Implementasi sistem CEISA Pelintas Batas, mendukung otomasi dalam verifikasi data, identifikasi pelintas batas dan masa berlaku KILB, serta pemotongan kuota otomatis dan database elektronik. Ke depan, akan diimplementasikan virtual account KILB dengan pemindai biometrik untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas KILB. Sinergi akan dijalin dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Imigrasi guna memangkas birokrasi dan memudahkan layanan penerbitan KILB.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa aturan ini sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam program Nawa Cita. “Aturan ini dibuat sejalan dengan

Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ungkap Heru.

Hal lain yang juga diatur dalam PMK 80 yaitu penegasan ketentuan tata niaga impor berupa pembatasan untuk barang pelintas batas, yang tidak diberlakukan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur ekspor bagi pelintas batas juga diatur dalam aturan ini, sehingga data statistik perdagangan perbatasan baik impor maupun ekspor dapat dipotret secara utuh.

Selain memfasilitasi pembangunan “toko serba ada”, Bea Cukai juga menyederhanakan prosedur impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor. Penyederhanaan dilakukan dengan penggunaan single document berupa Vehicle Declaration (VhD), yang diatur dalam PMK nomor 52/PMK.04/2019. VhD berfungsi sebagai permohonan sekaligus izin impor atau ekspor sementara,

pemberitahuan pabean, jaminan tertulis, dan dokumen pelindung.

Tidak hanya menyederhanakan prosedur, melalui aturan ini juga dilakukan modernisasi berupa otomasi pelayanan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor. Penyederhanaan dilakukan dengan implementasi SKP atau CEISA Vehicle Declaration System (VhDS) yang terintegrasi antar kantor Bea Cukai. Sinergi juga terjalin dengan Kepolisian RI, terkait jangka waktu impor sementara yang selama 30 hari dan dapat diperpanjang.

Pemberlakuan aturan ini merupakan upaya menerapkan international best practice dalam persyaratan impor sementara. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

1. kendaraan bermotor harus terdaftar di negara asing;
2. dimiliki atas nama warga negara asing;
3. dimasukan oleh pemilik atau kuasanya;
4. pada saat importasi bahan bakar minimal terisi  $\frac{3}{4}$  tangki;
5. tidak memiliki VhD yang belum diselesaikan, serta
6. mendapat endorse/cap stempel oleh otoritas berwenang negara asal.

Aturan ini akan memberikan kepastian hukum dan penerapan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran. Sanksi diberikan antara lain berupa:

1. denda 100% dari Bea Masuk dalam hal terlambat

2. melakukan ekspor kembali;
2. pembayaran Bea Masuk, Pajak Impor, dan Denda dalam hal kendaraan tidak diekspor kembali;
3. wajib melakukan reekspor dan pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal lokasi tidak sesuai;
4. pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal ekspor kembali tidak melapor kepada Bea Cukai, serta
5. penegahan<sup>1</sup> terhadap kendaraan bermotor dalam hal digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan wilayah penggunaan.

“Diharapkan dengan penyederhanaan prosedur impor dan ekspor serta pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk para pelintas batas di daerah perbatasan, maka masyarakat dapat menjalankan ketentuan secara mudah karena adanya kepastian hukum sehingga aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya berjalan lancar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,” pungkask Heru.

<sup>1</sup> Penegahan adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean

# PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pembayaran dividen BUMN mendorong kinerja  
PNBP Juni 2019

Realisasi PNBP  
s.d. 30 Juni  
2019 (dalam  
miliar Rupiah)

	2019	Realisasi		
	APBN	30 Juni 2019	% thd APBN	Growth y-o-y (%)
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,86	209.083,7	55,27	18,24
A. Penerimaan SDA	190.754,77	70.728,6	37,08	(5,83)
1. Migas	159.778,31	54.572,8	34,16	(7,11)
a. Minyak Bumi	118.606,71	54.572,8	46,01	(7,11)
b. Gas Alam	41.171,60	0,0	0,00	(99,35)
2. Non Migas	30.976,46	16.155,8	52,16	(1,22)
a. Pertambangan Minerba	24.960,72	12.875,5	51,58	(7,79)
b. Kehutanan	4.511,54	1.991,5	44,14	3,71
c. Perikanan	625,81	253,0	40,43	1,51
d. Pend. Per. Panas Bumi	878,38	1.035,8	117,92	366,33
B. Pendapatan dari KND	45.589,30	68.678,2	150,65	93,33
C. PNBP Lainnya	94.069,33	48.426,0	51,48	6,48
D. Pendapatan BLU	47.884,45	21.250,9	44,38	2,55

**D**i tengah pelemahan ekonomi yang ditandai dengan penurunan indikator harga komoditas, Penerimaan Negara Bukan Pajak tetap menunjukkan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan paruh tahun 2018. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, realisasi PNBP mencapai Rp209,08 triliun atau 55,27 persen dari APBN tahun 2019, tumbuh 18,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018

sebesar Rp176,83 triliun.

Realisasi ICP pada semester I tahun 2019 rata-rata sebesar USD 63,14 per barel, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (USD 66,55 per barel). Demikian pula halnya Harga Batubara Acuan yang pada semester I tahun 2019 tercatat sebesar USD87,83/ton, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018 (USD96,50/ton). Penurunan harga

komoditas ini berimbas kepada realisasi penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada semester I tahun 2019. Sampai dengan 30 Juni 2019, realisasi Penerimaan SDA mencapai Rp70,73 triliun, mengalami pertumbuhan negatif 5,83 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp75,11 triliun.

Realisasi penerimaan SDA pada semester I tahun 2019 ditopang oleh kenaikan Pendapatan dari Pertambangan Panas Bumi yang mencapai Rp1,03 triliun atau naik 366,3 persen dari penerimaan di semester I tahun 2018. Namun demikian, kenaikan ini tidak dapat menutupi penurunan kinerja sektor SDA akibat penurunan realisasi penerimaan SDA Migas dan Nonmigas. Realisasi Penerimaan Migas mencapai Rp54,57 triliun atau 34,16 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 7,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Penurunan juga terjadi pada sektor penerimaan nonmigas sebesar 1,22 persen dari semester I tahun 2018, dengan realisasi mencapai Rp16,15 triliun atau 52,16 persen dari target APBN tahun 2019.

Salah satu objek PNBP yang menyumbang peningkatan realisasi signifikan adalah Pengelolaan

Kekayaan Negara Dipisahkan. Sektor ini menyumbang Rp68,68 triliun pada semester I tahun 2019, yang merupakan 150,65 persen dari target dalam APBN 2019. Realisasi penerimaan dari KND ini meningkat secara signifikan yaitu 93,33 persen dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2018 (Rp35,58 triliun). Setoran Sisa Surplus Bank Indonesia pada bulan Mei 2019 sebesar Rp30,00 triliun dan setoran dividen yang terealisasi di bulan Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp2,76 triliun dan Rp35,87 triliun merupakan penyebab utama kenaikan realisasi Pendapatan dari KND.

Selain Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, sektor lain yang menyumbang kinerja positif dalam semester I tahun 2019 adalah PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Realisasi penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp48,42 triliun atau 51,48 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,48 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp45,47 triliun. Sementara itu, pendapatan BLU semester I tahun 2019 terealisasi sebesar Rp21,25 triliun atau mencapai 44,38 persen dari target APBN tahun 2019, atau naik sebesar 2,55 persen dari periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp20,72 triliun

## BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 30 Juni 2019 ditopang dengan meningkatnya penyerapan belanja K/L.

**R**ealisasi BPP sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp630,57 triliun atau 38,58 persen dari pagu APBN tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja realisasi BPP sampai dengan 30 Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar 12,92 persen dibandingkan dengan kinerja penyerapan BPP tahun sebelumnya sebesar 38,39 persen dari pagu APBN tahun 2018. Kinerja penyerapan BPP tersebut, ditopang oleh meningkatnya realisasi belanja K/L dari 34,93 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 40,02

persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja realisasi belanja bantuan sosial. Sementara itu, kinerja realisasi belanja Non K/L mengalami penurunan dari 43,23 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 37,01 persen terhadap pagu APBN tahun 2019 yang terutama disebabkan karena menurunnya kinerja realisasi belanja subsidi.

Realisasi BPP K/L sampai dengan 30 Juni 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 15,66 persen dibandingkan

Realisasi Belanja  
Pemerintah  
Pusat s.d Juni  
2019

Belanja Pemerintah Pusat	2019		Realisasi	
	APBN	s.d. 30 Juni 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
<b>Belanja K/L</b>	<b>855,45</b>	<b>342,34</b>	<b>40,02</b>	<b>15,66</b>
Belanja Pegawai	224,41	117,90	52,54	13,61
Belanja Barang	344,64	119,28	34,61	12,12
Belanja Modal	189,34	34,66	18,31	(14,93)
Bantuan Sosial	97,06	70,49	72,63	56,37
<b>Belanja Non K/L</b>	<b>778,89</b>	<b>288,23</b>	<b>37,01</b>	<b>9,82</b>
al. Pembayaran Bunga Utang	275,89	134,77	48,85	11,75
Subsidi	224,32	71,88	32,04	(2,79)
<b>Jumlah</b>	<b>1.634,34</b>	<b>630,57</b>	<b>38,58</b>	<b>12,92</b>

realisasi pada periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan realisasi BPP K/L terutama berasal dari realisasi belanja bantuan sosial yang tumbuh sebesar 56,37 persen, belanja pegawai sebesar 13,61 persen, serta belanja barang sebesar 12,12 persen. Pertumbuhan ketiga jenis belanja tersebut diperkirakan akan mendorong pertumbuhan konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Kinerja realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 30 Juni 2019 telah mencapai 72,63 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 58,35 persen dari pagu APBN tahun 2018. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sejak awal tahun, yang antara lain direalisasikan melalui: (i) pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai 82,4 persen dari alokasinya, (ii) penarikan di muka iuran PBI JKN hingga bulan November (11 bulan) yang telah dibayarkan Januari hingga Juni tahun 2019 yang telah mencapai 90,9 persen dari alokasinya, (iii) realisasi bantuan Pangan, dan (iv) realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi).

Sementara itu, realisasi belanja pegawai (khususnya belanja pegawai K/L) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 45,62 persen dari pagu APBN 2018 meningkat menjadi 52,54 persen dari pagu APBN 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L seiring dengan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L serta telah dicairkannya anggaran THR bagi aparatur negara pada akhir bulan Mei tahun 2019.

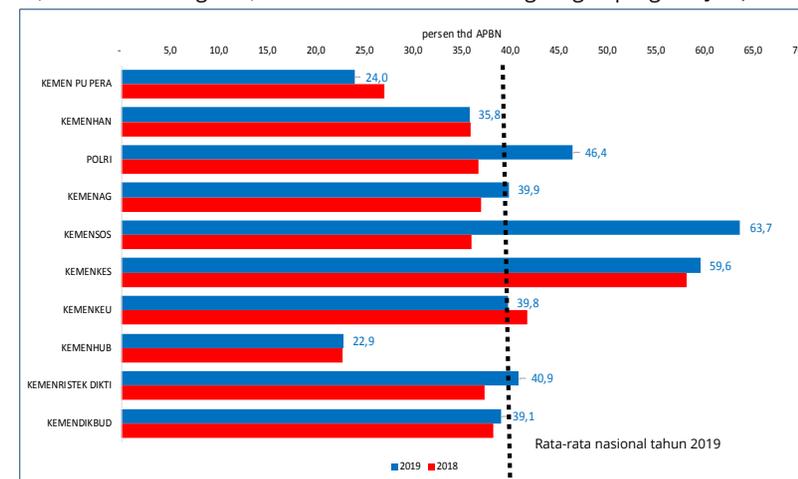
Realisasi belanja barang sampai dengan 30 Juni 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 31,40 persen terhadap APBN tahun 2018 menjadi 34,61 persen terhadap APBN tahun 2019. Proporsi realisasi belanja barang yang terbesar adalah belanja barang dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilu 2019, yaitu pemberian honor kepada badan Penyelenggara AdHoc Pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditambah dengan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlilh) dan Relawan. Selain itu, proporsi terbesar berikutnya adalah realisasi belanja barang dalam rangka pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang kepada siswa-siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Madrasah Ibtidaiyah

(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Realisasi belanja modal sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai 18,31 persen dari pagu APBN 2019. Proporsi realisasi belanja modal terbesar antara lain 1) belanja modal pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan dipergunakan untuk preservasi rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan terutama untuk menunjang kelancaran arus barang dan penumpang menjelang hari Raya Idul Fitri Juni 2019 termasuk prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, dan 2) belanja modal peralatan dan mesin dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama, dan Basarnas.

#### A. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp342,34 triliun atau 40,02 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 34,93 persen. Realisasi belanja K/L tersebut didominasi oleh 15 K/L terbesar (85,03 persen dari total belanja K/L), utamanya Kementerian Sosial yang telah merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, beberapa kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, dan penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan PBI (untuk mendukung keberlangsungan program JKN).



Grafik Perkembangan Penyerapan Belanja 10 K/L terbesar (% realisasi)

Tabel Nilai belanja yang sudah dikontrakan dan dilaporkan sampai dengan akhir Juni 2019

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan, nilai kontrak yang telah dilakukan K/L sampai dengan bulan Juni 2019 mencapai Rp173,95 triliun. Tiga K/L yang telah melakukan kontrak dengan nilai terbesar adalah Kemen PU PERA, Kemenhan, dan POLRI.

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Nilai Kontrak
1	KEMEN PU PERA	110,73	59,47
2	KEMENHAN	108,36	29,46
3	POLRI	86,19	20,60
4	KEMENHUB	41,55	19,15
5	KEMENRISTEK DIKTI	41,26	4,03
6	KEMENKES	58,75	3,43
7	KEMENTAN	21,69	3,41
8	KEMENKUMHAM	13,31	3,40
9	KEMENKEU	45,16	2,22
10	KEMEN LHK	9,08	2,06
<b>10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar</b>		<b>536,07</b>	<b>147,21</b>
<b>KL Lainnya</b>		<b>319,38</b>	<b>26,74</b>
<b>Total KL</b>		<b>855,45</b>	<b>173,95</b>

Sementara itu, beberapa output strategis K/L sampai dengan bulan Juni 2019 menunjukkan capaian yang positif diantaranya penyaluran PKH dan bantuan pangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus memperlihatkan adanya progres seperti pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, dan pembangunan jembatan.

#### B. REALISASI BELANJA NONK/L TAHUN 2019

Realisasi belanja non K/L sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp288,23 triliun lebih tinggi secara nominal dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai Rp262,45 triliun. Namun demikian, secara persentase belanja non K/L mengalami penurunan dari 43,23

Tabel Realisasi Belanja non-K/L s.d Juni 2019

Belanja NonK/L	2019			% Growth APBN
	APBN	s.d Juni 2019	% thd APBN	
1. Pembayaran Bunga Utang	275,89	134,77	48,85	11,75
2. Subsidi	224,32	71,88	32,04	(2,79)
<b>JUMLAH</b>	<b>778,89</b>	<b>288,23</b>	<b>37,01</b>	<b>9,82</b>

	INDIKATOR	TARGET	REAL S.D. JUNI
KEMENPUPERA	Pembangunan jalan baru (km)	405,6	63,76
	Pembangunan jalan tol (km)	8,26	4,63
	Pembangunan jembatan (m)	17.283,29	1.832,03
KEMENHUB	Pembangunan bandara	4	0
	Pembangunan rel KA (km 'sp)	540,6	0
BNN	Deteksi dini penyalahgunaan Narkoba di Instansi Pemerintah		
	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (berkas)	627	338
	Berkas Perkara TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (berkas)	47	12
KEMDIKBUD	Penyaluran KIP (siswa)	17,9 juta	11,7 juta
	Penyaluran KIP (siswa)	2,2 juta	6,82 ribu
KEMENAG	Penyaluran BOS (siswa)	8,9 juta	4,3 juta
	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	40 ribu	12,4 ribu
KEMRISTEKDIKTI	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	430.961	294.5 ribu
KEMENKES	Penyaluran JKN-KIS (jiwa)	96,8 juta	96,5 juta
KEMENSOS	Penyaluran PKH (KPM)	10,0 juta	9,8 juta
	Bantuan pangan	15,6 juta	15,3 juta
KEMENHAN	Peningkatan/Pengadaan/Penggantian Alutsista, a.l:		
	Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut	29	3
	MKK (unit)	235.717	0
POLRI	Progress Pengadaan		
	Almatsus (unit)	139.068	21.085
	Rumdin Personil (unit/KK)	89.914	10.608

persen terhadap APBN 2018 menjadi 37,01 persen terhadap APBN 2019. Penurunan realisasi belanja non K/L terutama disebabkan menurunnya realisasi pembayaran bunga utang dan belanja subsidi.

Realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar 48,85 persen terhadap APBN 2019, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 50,55 persen terhadap APBN 2018. Hal tersebut dikarenakan kondisi *yield* SBN yang cenderung menurun di awal tahun 2019 dibandingkan kondisi pada awal tahun 2018 sehingga biaya diskon cenderung lebih rendah. Selain itu, secara umum variasi komposisi

penerbitan dan perbedaan jadwal pembayaran kupon SBN seri benchmark juga menyebabkan pembayaran bunga utang bersifat dinamis.

Belanja subsidi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga terjangkau, antara lain LPG tabung 3 Kg, BBM jenis minyak solar dan minyak tanah, tarif listrik, dan pupuk. Namun demikian, Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran. Dalam APBN 2019, belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp224,3 triliun. Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp71,88 triliun atau 32,04 persen dari pagu APBN tahun 2019. Realisasi subsidi non energi dalam Semester I tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh realisasi subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan subsidi pajak.

## TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Dukung Kemajuan Desa, Kemenkeu Telah Salurkan Seluruh Dana Desa Tahap I dan II ke Daerah

**S**ampai dengan 30 Juni 2019, penyaluran TKDD telah terealisasi sebesar Rp403,95 triliun atau 48,86 persen dari pagu alokasi. Tumbuh 4,77 persen (yoy) bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp385,57 triliun.

### DANA PERIMBANGAN

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp42,39 triliun atau 39,86 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih tinggi 23,77 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018. Capaian ini disebabkan oleh adanya penyaluran sebagian Kurang Bayar (KB) DBH di bulan Mei 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.07/2019 sebesar Rp2,21 triliun (Rp1,40 triliun untuk KB DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara; Rp0,81 triliun untuk KB DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi).

Realisasi penyaluran DAU hingga akhir Juni 2019 telah mencapai Rp243,46 triliun atau 58,26 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Dari total Rp243,46 triliun, Rp1,46 triliun diantaranya merupakan realisasi penyaluran DAU Tambahan (pagu Rp3,00 triliun) kepada 403 Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi DAU di atas antara lain: (i) penyelesaian kewajiban Daerah Otonom Baru (DOB) pada 1 Pemerintah Daerah sebesar Rp2,00 miliar; (ii) penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh 3 Pemerintah Daerah sebesar Rp18,36 miliar; dan (iii) penundaan penyaluran DAU reguler terhadap 5 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebesar Rp14,22 miliar.

DAU Tambahan kini telah memasuki periode penyaluran Tahap II. Namun, per 30 Juni 2019, belum ada pemerintah daerah yang menyampaikan persyaratan penyaluran Tahap II. Pemerintah tengah berupaya mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan agar penyaluran DAU Tambahan Tahap II dapat terlaksana tepat waktu.

Beralih ke Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan *governance* pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan menerbitkan PMK Nomor 121/PMK.07/2018. PMK ini mengatur mengenai peran Inspektorat Daerah dalam melakukan reviu dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* pelaksanaan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang sebagai salah satu syarat penyaluran DAK Fisik. Selain itu, di tahun 2019 juga telah diintegrasikan aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) yaitu aplikasi KRISNA, dengan aplikasi yang digunakan dalam proses penyaluran yaitu OM SPAN. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan antara RK yang telah disetujui dengan RK yang diinput Pemerintah Daerah, mengingat RK merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan DAK Fisik di daerah.

Sampai dengan 30 Juni 2019, realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp5,00 triliun atau 7,21 persen dari pagu alokasi. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun 2018. Untuk mendorong realisasi penyaluran DAK Fisik Tahap I, Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada daerah secara langsung maupun melalui Kementerian Teknis terkait.

Realisasi penyaluran DAK Nonfisik sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp61,44 triliun atau 46,89 persen dari pagu alokasi. Sedikit menurun bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang semula disalurkan sekaligus menjadi 2 tahap (semesteran). Penyebab lainnya adalah optimalisasi penggunaan sisa dana DAK Nonfisik di rekening kas umum daerah.

Untuk meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga pengampu telah berupaya mendorong daerah (melalui sosialisasi, rekonsiliasi, dan kegiatan lainnya) agar segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik.

#### **DANA INSENTIF DAERAH (DID)**

Realisasi penyaluran DID per 30 Juni 2019 sebesar Rp5,17 triliun atau 51,75 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini merupakan hasil koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah penerima DID serta pemahaman Pemerintah Daerah yang baik terhadap peraturan terkait DID.

Terdapat 336 Pemerintah Daerah yang telah menerima penyaluran DID Tahap I, 13 diantaranya adalah Pemerintah Daerah penerima DID yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Adapun persyaratan penyaluran DID Tahap I berupa: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019; (ii) Rencana penggunaan DID Tahun Anggaran 2019; dan (iii) Laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2018 bagi daerah yang menerima DID Tahun Anggaran 2018.

#### **DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA**

Hingga 30 Juni 2019, Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah disalurkan sebesar Rp3,69 triliun atau 17,60

persen dari pagu alokasi. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan Provinsi Papua belum melengkapi persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017. Untuk mendorong penyaluran Dana Otsus Tahap I, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.

Sementara itu, Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp0,96 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2018.

#### **DANA DESA**

Realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sampai dengan 30 Juni 2019 telah mencapai Rp41,83 triliun atau 59,76 persen dari pagu alokasi. Tumbuh 16,65 persen (*yoy*) jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Capaian positif tersebut disebabkan Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah disalurkan seluruhnya pada bulan Juni 2019 kepada 434 daerah penerima.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2018 dan 2019  
Tanggal : 1 Januari s.d. 30 Juni 2019

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018			2019		
	Alokasi	Realisasi	% thd APBN	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>766.162,58</b>	<b>385.573,61</b>	<b>50,33</b>	<b>826.772,53</b>	<b>403.946,92</b>	<b>48,86</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>706.162,58</b>	<b>349.712,94</b>	<b>49,52</b>	<b>756.772,53</b>	<b>362.114,80</b>	<b>47,85</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>676.602,99</b>	<b>338.645,06</b>	<b>50,05</b>	<b>724.592,59</b>	<b>352.287,86</b>	<b>48,62</b>
1. Dana Transfer Umum	490.714,92	268.208,52	54,66	524.223,75	285.849,77	54,53
a. Dana Bagi Hasil	89.225,34	34.252,74	38,39	106.350,16	42.393,09	39,86
b. Dana Alokasi Umum	401.489,58	233.955,78	58,27	417.873,58	243.456,67	58,26
2. Dana Transfer Khusus	185.888,07	70.436,54	37,89	200.368,84	66.438,10	33,16
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	7.761,87	12,43	69.326,70	4.995,20	7,21
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.451,81	62.674,67	50,77	131.042,14	61.442,90	46,89
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.175,36</b>	<b>51,75</b>
<b>C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>21.059,58</b>	<b>6.817,87</b>	<b>32,37</b>	<b>22.179,94</b>	<b>4.651,58</b>	<b>20,97</b>
1. Dana Otsus	20.059,58	6.017,87	30,00	20.979,94	3.691,58	17,60
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.029,79	2.408,94	30,00	8.357,47	752,17	9,00
b. Provinsi Aceh	8.029,79	2.408,94	30,00	8.357,47	2.507,24	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.000,00	1.200,00	30,00	4.265,00	432,17	10,13
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.000,00	800,00	80,00	1.200,00	960,00	80,00
<b>Dana Desa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.860,67</b>	<b>59,77</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.832,12</b>	<b>59,76</b>

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

## PEMBIAYAAN UTANG

Pengelolaan Utang Aman, Rasio Posisi Utang Pemerintah Pusat terhadap PDB terjaga pada angka 29,50 persen.

**R**ealisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp180,45 triliun atau 50,2 persen target APBN, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp195,77 triliun atau 50,3 persen target APBN dan realisasi Pinjaman(Neto) sebesar negatif Rp15,27 triliun atau negatif 80,5 persen dari target APBN. Realiasi Pinjaman yang mencapai angka negatif menunjukkan bahwa realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar dari pada penarikan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Hingga akhir Juni 2019 Pemerintah telah membayarkan cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,58 triliun atau 39,3 persen dari target APBN, sedangkan cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri telah dibayarkan sebesar Rp43,52 triliun atau 58,1 persen target APBN.

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri hanya mencapai Rp0,19 triliun atau 9,7 persen target APBN dan penarikan Pinjaman Luar Negeri hanya mencapai Rp28,64 triliun atau 47,5 persen target APBN.

Indonesia sebagai negara berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya, dari Sabang sampai dengan Merauke tanpa terkecuali. Isu besar yang masih menjadi tantangan Indonesia untuk memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sampai dengan saat ini adalah kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya manusia. Isu kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat menjadi bahaya laten yang akan

Pembiayaan  
Utang

	2019		
	APBN	s.d. 30 Juni	% APBN
Pembiayaan Utang	359.250,6	180.450,9	50,2%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	388.957,9	195.722,7	50,3%
2. Pinjaman (Neto)	(29.707,3)	(15.271,8)	51,4%
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482,4	(388,2)	(80,5%)
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.956,4	190,6	9,7%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.473,9)	(578,8)	39,3%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189,7)	(14.883,6)	49,3%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	60.280,5	28.635,9	47,5%

mengakibatkan disintegrasi bangsa bila tidak diatasi dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk mengatasinya, Pemerintah telah mengatur strategi belanja di sektor-sektor prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, termasuk melalui Transfer ke Daerah yang mendukung kuatnya fundamental ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Namun saat ini Pendapatan Negara belum mencukupi untuk menutup pengeluaran atau belanja Pemerintah terutama untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di kancah internasional. Untuk itu Pembiayaan digunakan sebagai alat

untuk meningkatkan kapasitas fiskal dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Beberapa contoh yang dapat dikedepankan untuk pembiayaan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia adalah melalui pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalur kereta api menggunakan fasilitas pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara/ Sukuk Negara (SBSN). 14 proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi yang dimulai dari tahun 2018 hingga 2019 dengan nilai mencapai kurang lebih Rp7,1 triliun berasal dari pembiayaan SBSN. Infrastruktur

perkeretaapian tersebut meliputi antara lain jalur kereta Cirebon-Kroya segmen 3 hingga Jombang, Maja-Rangkasbitung, Kereta Api Layang Medan, Rantauprapat-Kotapinang, Binjai-Besitang-Langsa, Makassar-

Parepare, dan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung. Dengan pembangunan jalur kereta api, diharapkan ekonomi masyarakat di daerah akan bergeliat serta semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Posisi Utang Hingga Akhir Juni 2019

(dalam Triliun Rupiah)

	Juni - 19	
	Nominal	Komposisi
<b>Total Utang Pemerintah Pusat</b>	<b>4.570,17</b>	<b>100,00%</b>
a. Pinjaman	785,61	17,19%
1. Pinjaman Luar Negeri	778,64	17,04%
Bilateral	315,39	6,90%
Multilateral	425,08	9,30%
Komersial	38,17	0,84%
Suppliers	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	6,97	0,15%
b. Surat Berharga Negara	3.784,56	82,81%
1. Denominasi Rupiah	2.735,76	59,86%
Surat Utang Negara	2.275,29	49,79%
Surat Berharga Syariah Negara	460,47	10,08%
2. Denominasi Valas	1.048,80	22,95%
Surat Utang Negara	833,86	18,25%
Surat Berharga Syariah Negara	214,94	4,70%
Rasio Utang thd PDB	29,50%	

Meskipun pembiayaan menjadi pilihan dalam menutup defisit anggaran. Namun dalam menyusun kebijakan pembiayaan melalui utang, Pemerintah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (pruden), efisien, dan terukur (akuntabel). Pemerintah memiliki berbagai strategi, baik dalam jangka menengah maupun tahunan untuk mengelola utang dalam menjaga portofolio utang yang optimal, dengan biaya dan risiko yang minimal.

Pengelolaan utang Pemerintah juga telah diatur di dalam UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. UU Keuangan Negara telah mengatur batas defisit APBN sebesar 3 persen dari rasio PDB serta batas maksimal rasio utang adalah 60 persen terhadap PDB, sementara dalam UU APBN yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dengan DPR, telah ditetapkan besarnya estimasi pengadaaan pembiayaan dan besaran anggaran untuk melunasi utang negara. Adanya payung hukum tersebut semakin membuktikan bahwa pengelolaan utang Pemerintah senantiasa dilakukan secara hati-hati dalam batas aman.

APBN 2019 masih menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang memungkinkan belanja negara lebih besar dari pada pendapatan, sehingga

untuk menutupi kekurangan tersebut Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya, salah satunya dengan utang.

Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Juni 2019 mencapai Rp175,35 triliun, terutama bersumber dari penerbitan SBN (neto) dan pinjaman (neto) sebesar Rp180,45 triliun. Pembiayaan dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip pengelolaan utang yang prudent, produktif, efisien dan akuntabel.

Posisi utang Pemerintah per akhir Juni 2019 berada di angka Rp4.570,17 triliun, turun dari posisi Mei 2019 yang mencapai Rp4.571,89 triliun. Rasio utang juga menunjukkan penurunan sebanyak 0,22 dari 29,72 persen pada akhir Mei 2019 menjadi 29,50 persen pada akhir Juni 2019.

Angka tersebut membuktikan bahwa utang Pemerintah telah dikelola dengan aman dimana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 0,84 persen yang masih jauh berada di bawah batas aman 3 persen serta realisasi rasio posisi utang sebesar 29,72 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia secara agregat mampu menutup lebih dari 3 kali jumlah posisi utang Pemerintah.

Pada tanggal 18 Juni 2019 Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi Euro sebesar EUR0,75 miliar untuk tenor 7 tahun dengan tingkat kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan SUN denominasi Euro yaitu sebesar 1,45 persen. Selain itu, Pemerintah juga berhasil menerbitkan SUN dalam denominasi US Dollar sebesar USD0,75 miliar untuk tenor 10 tahun dengan tingkat kupon sebesar 3,4 persen. Penerbitan SUN dalam valuta asing dilakukan untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing serta mendukung kuatnya cadangan devisa negara. Sampai akhir semester I 2019, porsi Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih mendominasi sebesar Rp2.735,76 triliun atau 72,29 persen dari total SBN secara keseluruhan dibandingkan dengan porsi SBN dalam valuta asing sebesar Rp1.048,80 triliun atau 27,71 persen dari total SBN secara keseluruhan.

Pengelolaan utang Pemerintah yang telah dilaksanakan dengan cukup baik semakin diakui dunia. Selain dari peningkatan peringkat kredit oleh S&P pada akhir Mei lalu dimana salah satu penilaian dari S&P adalah adanya pengelolaan kebijakan fiskal yang amat baik karena tingkat utang dijaga pada titik yang paling rendah. Pengelolaan fiskal dan utang Indonesia mendapat penilaian yang tertinggi diantara

negara-negara peers. Selanjutnya, pada pertengahan Juni 2019 Indonesia mendapat kunjungan dari 6 orang pejabat dan pegawai delegasi Kementerian Keuangan Vietnam yang berasal dari Department of Debt Management and External Finance, Capital Market Division dan Hanoi Stock Exchange. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi dan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman Kementerian Keuangan Indonesia sebagai salah satu *pioneer* dalam pemanfaatan *Debt Management Financial Analysis System* (DMFAS). DMFAS merupakan sistem yang digunakan untuk menatausahakan utang, termasuk pengelolaan risiko, strategi utang, analisis dan publikasi serta strategi komunikasi dengan investor.

Pembiayaan melalui utang yang dilakukan Pemerintah sudah menuai banyak manfaat yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Baik dari sisi pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek dan program nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maupun pembiayaan proyek melalui instrumen syariah yang disebut *Project Financing Sukuk* (PBS).

## Momentum Kenaikan Peringkat Kredit Dukung Penerbitan SUN dalam Dua Valuta Asing

Pengelolaan utang oleh Pemerintah dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian, produktif, terukur dan efisiensi biaya, yang salah satunya dituangkan ke dalam strategi diversifikasi portofolio pembiayaan. Melalui strategi tersebut Pemerintah dapat menjaga biaya utang pada level yang rendah dan risiko utang pada level yang aman serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal. Diversifikasi portofolio yang dilakukan antara lain meliputi instrumen utang, jenis suku bunga, jenis mata uang, dan jenis tenor, sehingga Pemerintah dapat lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan yang efisien untuk memenuhi target Pembiayaan yang diamanatkan dalam UU APBN.

Diversifikasi jenis mata uang dilakukan dalam beberapa mata uang asing, termasuk mata dengan nilai tukar yang stabil seperti USD, EUR, dan JPY. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing serta mendukung kuatnya cadangan devisa negara. Sementara itu, diversifikasi dari segi tenor

(panjang jatuh tempo utang) dilakukan untuk menjaga pencapaian target pembiayaan yang efisien dengan risiko yang terkendali, terutama dalam menghadapi pasar keuangan yang sedang bergejolak dimana Pemerintah cenderung mengadakan utang dalam tenor pendek. Diversifikasi dari sisi tenor juga digunakan untuk penataan profil jatuh tempo utang yang lebih merata serta meningkatkan likuiditas instrumen SBN.

Untuk merealisasikan strategi tersebut, pada tanggal 18 Juni 2019 Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing (dual-currency) yang terdiri dari denominasi US Dollar sebesar USD0,75 miliar untuk tenor 10 tahun (seri RI0929) dan Euro sebesar EUR0,75 miliar untuk tenor 7 tahun (seri RIEUR0926). Momentum kenaikan peringkat kredit Indonesia pada akhir Mei lalu dari BBB- outlook stable menjadi BBB outlook stable turut mendukung keberhasilan penerbitan dual-currency yang merupakan penerbitan ketiga, setelah penerbitan pada tahun 2017 dan 2018.

Pada transaksi tersebut, seri RIEUR0926 berhasil diterbitkan dengan tingkat kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan SUN denominasi Euro yaitu sebesar 1,45 persen. Seri RIEUR0926 merupakan penerbitan keenam Pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi Euro dan merupakan penerbitan kedua denominasi Euro dalam format SEC-Registered. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah yang berkesinambungan untuk memperluas basis investor di Eropa. Sementara itu untuk seri RI0929, Pemerintah berhasil menerbitkannya dengan tingkat kupon sebesar 3,4 persen. Penerbitan seri ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas SUN dalam denominasi US Dollar yang dapat diperdagangkan bagi investor Amerika Serikat dan global.

Penerbitan SUN dalam dual-currency ini menunjukkan bahwa Pemerintah mampu menarik minat investor dari berbagai negara dan beragam kelompok investor yang dibuktikan dengan jumlah penawaran akhir untuk seri RIEUR0926 dan RI0929,

masing-masing mencapai 271 dan 107 investor.

Selanjutnya, kenaikan peringkat kredit Indonesia oleh S&P menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia bukan hanya semakin baik tetapi juga aman, yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDB per kapita riil di Indonesia yang mencapai 4,1% berdasarkan rata-rata tertimbang 10 tahun, sementara rata-rata pertumbuhan PDB per kapita riil seluruh dunia yang hanya sekitar 2,2%. Hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk menjaga kestabilan pasar keuangannya di tengah volatilitas pasar keuangan dunia melalui kebijakan fiskal “countercyclical” yang tepat.

Indonesia masih berpotensi untuk kembali menaikkan peringkat kreditnya melalui perbaikan dan pengembangan manajemen fiskal dan kebijakan eksternalnya. Berdasarkan penurunan defisit pada 2018 lalu, Indonesia optimis dapat mempertahankan atau bahkan menurunkan kembali defisitnya di bawah 2% selama 4 tahun ke depan.



## Hati-Hati Penipuan Lelang Fiktif

Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), bekerja sama dengan Bareskrim POLRI telah menangkap 6 (enam) pelaku penipuan lelang fiktif yang mengatasnamakan DJKN dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang dikenal oleh banyak orang dengan sebutan Kantor Lelang.

Dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir, harus diakui bahwa penipuan lelang

fiktif kian marak terjadi dengan berbagai modus. Modus penipuan yang sering terjadi adalah pelaku mengirimkan pesan secara acak kepada para korban melalui Whatsapp yang berisi penawaran kendaraan mobil murah dibawah harga standar yang seolah-olah diadakan KPKNL. Pelaku menggunakan foto profil salah satu pejabat dari KPKNL agar korbannya yakin bahwa itu benar-benar dari KPKNL yang sedang mengadakan lelang.

Tentu saja, penipuan seperti ini

terjadi karena adanya peluang, dimana banyak masyarakat yang menginginkan memperoleh berbagai macam barang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga seharusnya. Namun di sisi lain, banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa itu lelang dan bagaimana prosedur lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL.

KPKNL selalu mengumumkan pelaksanaan lelang melalui situs web resmi lelang.go.id dan tidak ada proses lelang yang dilakukan melalui telepon,



*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*

media sosial maupun pesan singkat atau aplikasi chat yang dilakukan DJKN/ KPKNL. Selain itu, peserta juga tidak dimintai uang muka agar dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang. Tidak ada satupun pejabat atau pegawai DJKN dapat menjanjikan kemenangan.

Adapun ciri-ciri pelaku penipuan lelang adalah sebagai berikut:

- Aktif menghubungi nomor pribadi korban melalui panggilan telepon atau aplikasi chat;
- Mengaku sebagai pejabat/pegawai dari KPKNL atau instansi lain;
- Menawarkan harga murah yang tidak wajar;
- Harga yang ditawarkan pelaku bukan berasal dari harga yang terbentuk dalam normalnya proses lelang, dalam hal ini kasus lelang fiktif, dimana proses lelang tidak pernah terjadi;
- Meminta uang muka/uang jaminan

penawaran lelang yang ditransfer ke rekening atas nama pribadi pelaku;

- Menjanjikan menang lelang;
- Mendesak/menakut-nakuti korban dengan ancaman tidak jadi menang lelang jika tidak segera transfer uang muka/uang jaminan penawaran lelang;
- Menggunakan akun media sosial palsu meniru akun resmi KPKNL atau DJKN untuk menawarkan barang menggunakan foto barang dengan harga murah (tidak wajar);

Kemenkeu selalu menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat, pegawai, atau kantor vertikal DJKN dan/atau KPKNL. Apabila terdapat hal yang kurang jelas atau janggal, masyarakat dapat segera menghubungi call center DJKN 1500991 atau mengunjungi KPKNL terdekat.

Realisasi APBN s.d. 30 Juni 2018 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2018			2019		
	APBN	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.894.720,4</b>	<b>833.448,2</b>	<b>44,0%</b>	<b>2.165.111,8</b>	<b>898.762,4</b>	<b>41,5%</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893.523,5	830.327,9	43,9%	2.164.676,5	898.027,9	41,5%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618.095,5	653.495,2	40,4%	1.786.378,7	688.944,2	38,6%
a. Pajak Dalam Negeri	1.579.395,5	632.503,3	40,0%	1.743.056,9	670.043,1	38,4%
b. Pajak Perdagangan Internasional	38.700,0	20.991,9	54,2%	43.321,8	18.901,1	43,6%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275.428,0	176.832,7	64,2%	378.297,9	209.083,7	55,3%
II. HIBAH	1.196,9	3.120,3	260,7%	435,3	734,5	168,7%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.220.657,0</b>	<b>944.008,7</b>	<b>42,5%</b>	<b>2.461.112,1</b>	<b>1.034.514,0</b>	<b>42,0%</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454.494,4	558.435,1	38,4%	1.634.339,5	630.567,0	38,6%
1. Belanja K/L	847.435,2	295.989,2	34,9%	855.445,8	342.336,7	40,0%
2. Belanja Non /L	607.059,2	262.445,9	43,2%	778.893,7	288.230,3	37,0%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.162,6	385.573,6	50,3%	826.772,5	403.947,0	48,9%
1. Transfer ke Daerah	706.162,6	349.712,9	49,5%	756.772,5	362.114,9	47,8%
2. Dana Desa	60.000,0	35.860,7	59,8%	70.000,0	41.832,1	59,8%
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(87.329,5)</b>	<b>10.045,0</b>	<b>-11,5%</b>	<b>(20.115,0)</b>	<b>(977,2)</b>	<b>4,9%</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	<b>(325.936,6)</b>	<b>(110.560,5)</b>		<b>(296.000,2)</b>	<b>(135.751,6)</b>	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(0,74)		(1,84)	(0,84)	
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>325.936,6</b>	<b>176.246,7</b>	<b>54,1%</b>	<b>296.000,2</b>	<b>175.347,0</b>	<b>59,2%</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	399.219,4	176.001,8	44,1%	359.250,6	180.450,9	50,2%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65.654,3)	(800,0)	1,2%	(75.900,3)	(6.500,0)	8,6%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6.690,1)	946,6	-14,15%	(2.350,0)	1.382,3	-58,8%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.121,3)	-	0,0%	0,0	-	0,0%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	183,0	98,3	53,7%	15.000,0	13,8	0,1%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN		65.686,3			39.595,5	

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*

